

**DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
TERHADAP KUALITAS PERATURAN DAERAH  
(Studi Di Kabupaten Pesisir Barat)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Fakultas Ushuluddin**

**DI SUSUN**

**Zahril Husien  
1431040031**

**JURUSAN PEMIKIR POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 2019**

**DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DPRD TERHADAP KUALITAS  
PERATURAN DAERAH**

**(Studi di kabupaten pesisir barat)**

**Pembimbing I : Dr.Nadirsah Hawari,M.A**  
**Pembimbing II : Abdul Qohar,M.si**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin**



**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2 FEBUARI 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINILITA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

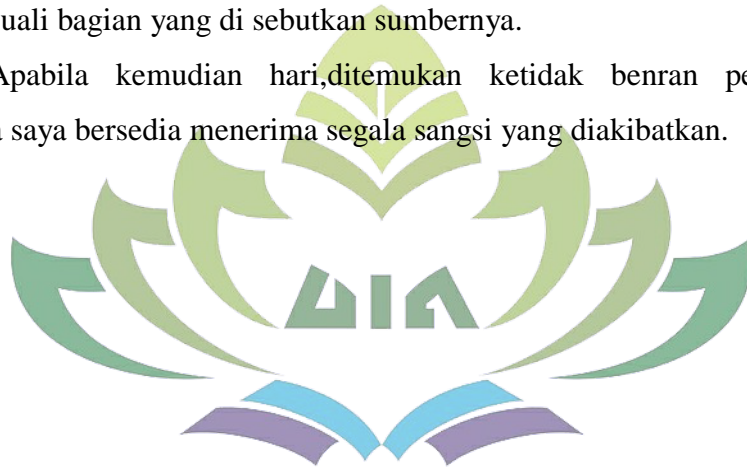
Nama : Zahrial Husien

NPM : 1431040031

Program Study : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul, **Dampak Studi Banding Anggota DPRD Terhadap Kualitas Peraturan Daerah (Study Kabupaten Pesisir Barat)**, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali bagian yang di sebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari, ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diakibatkan.



Bandar lampung, 2 febuari 2019

Peneliti

Zahrial husien  
NPM : 14310400

## **DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DPRD**

### **TERHADAP KUALITAS PERDA**

**(Studi Di Kabupaten Pesisir Barat)**

#### **ABSTRAK**

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan studi banding terhadap kualitas perda dilaksanakan dengan pengumpulan data mengenai hasil studi banding, langkah yang ditempuh diantaranya adalah dengan melakukan studi banding atau kunjungan kerja pada daerah (kabupaten/kota atau provinsi) lain, yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan hasil studi banding terhadap kualitas Perda yang akan diterapkan di kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) seperti apa dampak studi banding anggota DPRD terhadap kualitas perda 2) Bagaimanakah hasil pelaksanaan studi banding anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pelaksanaan studi banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat merupakan kegiatan yang kurang efektif dalam melihat kualitas Peraturan Daerah karena tujuan studi banding untuk mengumpulkan informasi dan materi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui fasilitas internet, telekonferensi yang lebih tepat cepat dan murah tanpa harus melakukan studi banding. (2) Hasil pelaksanaan studi banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum signifikan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, karena DPRD belum memenuhi akuntabilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat atas hasil studi banding yang dilaksanakan. Belum ada sistem pelaporan hasil studi banding secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil studi banding tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam penyusunan rancangan Perda hendaknya mengoptimalkan fungsi staf ahli DPRD sebagai akses masuk informasi atau pengetahuan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi tentang rancangan Perda (2) DPRD disarankan untuk menempuh cara lain dalam pengumpulan informasi rancangan Perda, yaitu dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar yang telah membuat Perda sebelumnya atau orang yang berkompeten terkait dengan materi Perda yang akan dibahas.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp: 703289**


**PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi : DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DPRD  
TERHADAP KUALITAS PERATURAN DAERAH  
(Study Kabupaten Pesisir Barat).**

**Nama Mahasiswa : Zahrial Husien**  
**NPM : 1431040031**  
**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**  
**Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimonaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas  
Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing 1**  
  
**Dr. Nadirsah Hawari, MA.**  
**NIP. 197406282008011013**

**Pembimbing 11**  
  
**Abdul Qohar M. Si**  
**NIP. 197103122005011005**

**Ketua Jurusan**

  
**Dr. Nadirsah Hawari, MA.**  
**NIP. 197406282008011013**





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp: 703289

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DPRD TERHADAP KUALITAS PERATURAN DAERAH (Study Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh **ZAHRIAL HUSIEN, NPM. 1431040031**, jurusan **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (PPD)** telah diujikan dalam sidang monaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 27 Juni 2019**

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Dr. Sudarman, M.Ag**

Sekretaris : **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**

Penguji Utama : **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**

Penguji I : **Dr. Nadirsah Hawari, M.A**

Penguji II : **Abdul Qohar, M.Si**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Study Agama



**Dr. H. A. Syad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag**  
NIP. 195808231993031001



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka” (TQS. Ar-Ra’d [13]: 11).*

*“Bahagia sesungguhnya ketika kita berguna bagi orang lain”*  
(peneliti)



## PERSEMBAHAN

Dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1.Kedua Orang tua ter cinta, Ayahanda Zulkarnain dan Ibudaku tercinta Zirnawati,atas ketulusannya dalam mendidik akhlak, membesarkan jiwa dan membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta keikhlasan dalam do'a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

2.Saudara-saudara yang saya banggakan udo M.zamzari,S.pd,i.uwo Zurnani,Abang Zahyan,SH.Adek Bungsu Zupriadi,SH. yang selalu memberikan semangat serta senyuman yang membuat penulis terus bersemangat.

3.Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik kedepannya.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 Desember 1995 di Kabupaten Pesisir Barat anak ke empat dari lima saudara dari pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Zirnawati. Pendidikan Dasar di SD N 01 Semberjo Kc, Bangkumat Belimbing namun pindah ke Mi Darul Fallah kc Bangkumat Belimbing di selesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP N 01 Bangkumat Belimbing lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA N 01 Mesuji Timur lulus pada tahun 2014.

Setelah menerima bukti kelulusan pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Study Agama.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Agung 2, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Selama kuliah Penulis pernah aktif menjadi pengurus Organisasi Ekstra Kampus PMII.

Penulis

**Zahrial Husien**  
**NPM.1431040031**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun bantuan materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucap kan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN RadenIntan Lampung yang telah member kan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN RadenIntan Lampung.
2. Bapak Dr.H.Arsyad Sobby Kesuma,Lc,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN RadenIntan Lampung.
3. Bapak Dr. Nadirsyah Hawari, M.A selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Tin Amalia Fitri,S.Sos,M.Si,selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Dr. Nadirsyah Hawari, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Qohar, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan



arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddindan Studi Agama UIN RadenIntan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar Ismail yang telah memberikan dukungan, bantuan, arahan dari awal hingga menyelesaikan studi S1 ini.
7. Kekasih Lidia Novita Sari yang telah menemani sampai saatini.
8. Sahabat-sahabat Seperjuangan Ktum HMI Prengki Adian Putra, Ktum HMPPB Ahmad Erdi Mustika,Asbiyani,Akbar,Muklis,Ali, yang sudah seperti keluarga dan berjuang bersama-sama selama kurang lebih 4 tahun. Serta Abang Komaruddin yang selalu memberi semangat dan ilmunya , saran dan masukan.
9. Keluarga besar PPI B 2014, yang telah menjadi motivator-motivator dan pembimbing penulis dikelas selama perkuliahan dari awal hingga skripsi ini selesai.
10. Ustad Abdul Somad,yang terus menerus mengenal kan Rasalullah SAW dan yang selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan.
11. Keluarga Besar Sekatriat HMPPB,Ktum Ahmad Erdi Mustika,Sekum Riyan,Efran Sahreza,Dedy,Irwansah,Eprianda,Dendi,Heni,Ani,Eli,Dani.
12. Keluarga Besar Himpunan pemuda dan pelajar bangkumat,(HP2B)
13. Sahabat-Sahabat dari PMII yang tak bisa aku sebutkan satu persatu

14. Semua pihak yang tidak bisa disebut kan nama nya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Amin.

Skripsi dengan judul “Dampak Studi Banding Anggota DPRD Terhadap Kualitas Peraturan Daerah”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Akhir nya penulis memohon Taufik dan Hidayah kepada Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin

Bandar Lampung 17 Desember 2018

Penulis

**Zahrial Husien**  
**NPM.1431040031**



## DAPTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAPTAR LAMPIRAN.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul.....	3
C. Latar belakang masalah.....	4
D. Rumusan masalah.....	9
E. Tujuan penelitian.....	9
F. Manfaat penelitian.....	10
G. Tinjauan pustaka.....	10
H. Metode penelitian.....	12

## **BAB II STUDI BANDING TERHADAP KUALITAS PERATURAN DAERAH**

A .Dampak Studi Banding Anggota DPRD.....	19
1.Pengertian Dampak.....	19
2.Pengertian Studi Banding.....	19
B.Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.....	20
1.Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.....	21
2.Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.....	26
3.Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.....	29
C.Peraturan Daerah.....	29
1.Pengertian Peraturan Daerah.....	29
2.Tujuan Peraturan Daerah .....	30
3.Fungsi Peraturan Daerah.....	31
4.Tujuan Pembentukan peraturan daerah.....	31
5.Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah.....	38
6.Pengajuan Peraturan Daerah Dari DPRD.....	45

## **BAB III GAMBAR UMUM DAERAH PENELITIAN DAN STUDI BANDING**

A.Gamabar Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat.....	47
1.Keadaan Geografis.....	48
2.Topografi Dan Iklim.....	48
3.Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.....	50
B. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk.....	54
1.Penduduk.....	54
2.Polo Pemukiman.....	54



3.Perekonomian.....	55
4.Pendidikan Dan Kesehatan.....	56
5.Agama Dan Kepercayaan.....	57
C.Program Studi Banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat.....	58
D.Gambar DPRD Kabupaten Pesisir Barat.....	59
1.Susunan Personalia Kepengurusan DPRD.....	63

#### **BAB IV DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DPRD TERHADAP KUALITAS PERDA**

A.Apakah Dampak Studi Banding Anggota DPRD Terhadap Kualitas.....	65
Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat.....	65
B.Faktor-Faktor pendukung Dan Penghambat Studi Banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat.....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A.Kesimpulan.....	83
B.Saran.....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Lampiran I : Pedoman Wawancara
2. Daftar Lampiran II : Surat Konsultasi
3. Daftar Lampiran III : Pedoman Wawancara
4. Daftar Lampiran IV : Daftar Nama Informan
5. Daftar Lampiran V : Daftar Dokumentasi
6. Daftar Lampiran VI : Surat Keputusan Judul Skripsi
7. Daftar Lampiran VII : Surat Izin Penelitian UIN Raden Intan Lampung
8. Daftar Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Kantor DPRD Kabupaten pesisir barat.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penulis akan menyajikan proposal skripsi dengan judul **“Dampak Studi Banding Anggota DPRD Terhadap Kualitas Peraturan Daerah di Pesisir Barat”**, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu kiranya penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul diatas secara rinci sehingga dapat dimengerti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan<sup>1</sup>

Pengertian definisi Studi Banding yaitu meninjau dan belajar dari tempat lain agar dapat bisa diterapkan serta dikembangkan ditempat sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pengertian ”studi” adalah penelitian ilmiah, kajian, telaah, sedangkan ”Banding” berarti persamaan, tara, imbalan, jika disatukan pengertian studi banding adalah proses penggalan ilmu khusus tentang

---

<sup>1</sup> [www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml](http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml) (diakses 16 Maret 2017 pukul 20.25 WIB)



kelebihan tempat lain sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembandingan ditempat Kabupaten Pesisir Barat .kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengunjungi atau menemui objek tertentu yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat,pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu,peluasan usaha,perbaikan sistem,penentuan kebijakan baru,dan laian- lain.

Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya.Pengertian dari studi banding itu sendiri adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lan.<sup>2</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan

---

<sup>2</sup> <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/pengertian-studi-banding/>. Diakses pada jam 23.11

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

eksekusi pemerintah daerah Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.<sup>4</sup>

## **B.Alasan Memilih Judul**

Suatu hal yang mendasar mengapa penulis memilih judul diatas sebagai judul penelitian adalah:

### **1.Alasan Objektif**

Penulis selaku putra daerah ingin mengetahui bagaimana “dampak studi banding anggota DPRD terhadap kualitas peraturan Daerah di kabupaten pesisir barat”sajahu ini seperti apa peroses implementasinya study banding tersebut dengan dilihat kualitas peraturan daerah yang sudah dibuat oleh anggota DPRD.

Judul yang di angkat ada relevansinya dengan jurusan pemikiran politik islam (PPI) dan penelitian ini di dukung dengan litelatur yang memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat di selesaikan sesuai dengan waktu yang di rencanakan.

### **2.Alasan Subjektif**

Adanya suatu aturan atau kebijakan yang di buat oleh anggota DPRD dan pemerintahan kabupaten pesisir barat adalah sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejatraan, untuk mencapai kesejtraan tersebut maka peraturan

---

<sup>4</sup> .Maria farida indrati,s.2007.ilmu perundang undangan.cet ke-7  
yogyakarta:kamis.hal.202.

yang sudah dibuat harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. seperti anggota DPRD telah melaksanakan study banding kedaerah kepulauan seribu tahun 2018 merupakan salah satu program untuk konsultasi dan mempelajari potensi kawasan wisata di kepulauan seribu, sehingga dapat diaplikasikan di kabupaten pesisir barat, dari hasil study banding tersebut tentunya anggota DPRD mampu untuk menerapkan hasil studi banding tersebut seperti kawasan wisata pesisir barat perlu adanya pembangunan dibidang infrastruktur, seperti akses jalan, kfc, fila, dan makan khas pesisir barat.

### **C. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 menyebabkan peranan peraturan semakin mengedepan. Intensitas dan aktivitas dalam upaya menyusun suatu tatanan kehidupan yang baru di Indonesia, melalui pembangunan dan modernisasi, ternyata memberikan pengaruh terhadap pembuatan peraturan. Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Pemerintah dalam ketentuan ini, bermakna sebagai



kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan lingkungan jabatan yaitu pemerintah dan DPRD.<sup>5</sup>

Peraturan daerah menjadi suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat di era otonomi daerah, peraturan daerah akan melayani masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya peraturan menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah<sup>6</sup>

Peraturan Daerah menjadi sebuah dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, karena itu perancangan Perda harus mempertimbangkan masukan-masukan dari publik. Keterlibatan publik dalam perancangan Perda sampai dengan sejauh mana usulan publik tersebut diimplementasikan, dapat dijadikan salah satu ukuran partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Regulasi merupakan instrumen yang paling murah dan relatif paling efektif mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomidan kesejahteraan masyarakat. Regulasi di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah harus disusun sedemikian rupa sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung dan penerapannya tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Oleh karenanya, penyusunan perda sebagai produk hukum daerah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk mendukung jalanya roda pemerintahan.

---

<sup>5</sup> Pasal undang undang nomor 32 tahun 2004

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan

daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Menurut Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa anggota DPRD hak mengajukan rancangan Perda.

DPRD merupakan representasi rakyat, karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perda inisiatif yang diajukan DPRD merupakan kemauan masyarakat yang diwakili DPRD sebagai hasil

penelitian tentang berbagai fenomena, keadaan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain pengajuan perda inisiatif merupakan salah satu upaya DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi legislasi. Sesuai dengan paparan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengajuan Perda inisiatif DPRD adalah pembentukan aturan hukum (dalam hal ini adalah Perda) yang dilakukan oleh rakyat melalui wakil mereka di DPRD.

Upaya DPRD sebelum penyusunan Perda dilaksanakan dengan pengumpulan data mengenai Perda yang akan disusun, langkah yang ditempuh di antaranya dengan Studi Banding atau Kunjungan kerja pada daerah (kabupaten/ kota atau provinsi) lain, yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Perda yang akan disusun tersebut.<sup>7</sup>

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Lampung setelah pemekaran menjadi kabupaten yang otonom dari Kabupaten Lampung Barat. Secara administratif Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yang terbagi menjadi 116 (satus enam belas) pekon /desa dan 2 (dua) kelurahan. Dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada, kecamatan Bangkunt Belimbing merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu sekitar 943,70 Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Kerui Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil yaitu sekitar 40,92 Km<sup>2</sup>.

DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi harus dapat menggali serta menyelesaikan permasalahan-

---

<sup>7</sup>Depkum HAM, Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah, 2006, hlm.



permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan kedalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan memaksa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. DPRD melalui fungsi legislasinya dituntut untuk berperan aktif dalam proses pengusulan rancangan peraturan daerah untuk menghasilkan suatu peraturan daerah yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat DPRD kabupaten pesisir barat.

Maka dari itu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan studi banding ke daerah-daerah seperti Kota Batam dan Kepulauan Seribu yang memang lebih maju dibandingkan Pesisir Barat, agar hasil dari studi banding tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Pesisir Barat dengan menyesuaikan kualitas-kualitas perda-perda yang sudah ada. dalam pelaksanaan studi banding di daerah kota Batam dan Kepulauan Seribu tujuannya agar mendapatkan informasi dan ide-ide baru di daerah tersebut, sehingga bisa di contoh di Kabupaten Pesisir Barat baik dalam penyusunan perda yang berkualitas serta mencontoh wisata yang memang jauh lebih maju di bandingkan daerah sendiri. sehingga bisa jadi acuan untuk menata wisata di Kabupaten Pesisir Barat menjadi lebih maju baik itu di bidang hotel peminapan, restoran khas Pesisir Barat, maupun infrastruktur daerahnya.

#### **D. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikatakan mengandung dua level yang berbeda. Yang pertama berada di level teoritik, sementara yang kedua lebih dekat kepada problem empirik, sehingga dengan demikian rumusan masalah dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan fokus persoalan agar kerangka pembahasan menjadi lebih fokus dan terarah.

Agar tidak membuat kajian menjadi ambivalens atau tidak mempunyai hasil yang jelas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah,

”Bagai mana Dampak Studi Banding Anggota DPDR Terhadap Kualitas Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Barat”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan Rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak studi banding anggota DPRD terhadap kualitas peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Pesisir Barat.

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir barat sebagai unsur yang secara langsung turut merasakan kinerja Pemerintahan Daerah pesisir barat.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat pada umumnya bagi lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya bagi unsur Pemerintahan Daerah kabupaten pesisir barat dan terhadap anggota DPRD pesisir barat dalam menyikapi berbagai masalah pembangunan di kabupaten pesisir barat.
3. Di harapkan juga dapat ditemukan korelasi yang jelas antara penyerapan aspirasi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat di jadikan umpan balik bagi DPRD Pesisir Barat khususnya dalam merumuskan serta meningkatkan peran dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
4. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah bagian yang tak kalah penting dalam sebuah buku. melalui tinjauan pustaka tersebut dapat di ketahui posisi, orisinalitas dan eksistensi sebuah buku, di antara karya-karya yang terdahulu.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian, yang mengaji masalah tersebut di antaranya:

---

H. Zainal Abidin. *Imamah dan Implikasinya* dalam kehidupan sosial, cet 1, (palu badan Litbang dan Diklat kementerian agama Ri, 2012) h.16



1. Peneliti yang berhubungan dengan studi banding, pernah dilakukan oleh Lucia Eltariza Ajeng Kumala Dewi skripsi yang berjudul “Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Luar negeri periode April-Mei 2012”

2. Peneliti yang juga memiliki kedekatan tema dengan peneliti skripsi ini pernah dilakukan oleh Yohanes Hendrico Tomson, Nurmayani, S.H., M.H., Satria Prayoga, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul, “Efektivitas Pelaksanaan Studi Banding DPRD Kota Bandar” Lampung Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Kesimpulannya Pelaksanaan studi banding DPRD Kota Bandar Lampung merupakan kegiatan yang tidak efektif dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, karena tujuan studi banding untuk mengumpulkan informasi dan materi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui fasilitas internet, telekonferensi yang lebih tepat, cepat, dan murah, tanpa harus melakukan studi banding.

3. Peneliti selanjutnya yang juga memiliki kedekatan tema dengan peneliti skripsi ini pernah dilakukan oleh Yadi Supriyadi, “Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung”. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung. kesimpulan Komunikasi politik yang dilakukan DPRD Kota Bandung dalam meningkatkan peran legislatif di Kota Bandung, dilakukan dengan

cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang biasanya diwakili oleh elemen-elemen masyarakat tertentu. Strategi yang digunakan dalam menyampaikan komunikasi politik tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perencanaan, penyampaian pesan, dan pengelolaan media komunikasi politik.

Dalam pengelolaan pesan komunikasi politik, pengelolaan isu-isu politik strategis masih minim dilakukan DPRD Kota Bandung, mereka juga jarang tampil di media massa.

5.Selanjutnya Skripsi Yang Di Susun Oleh Rattah Pinnusa Herasari Handisa Npm 0414091001098 Universitas Tulungagung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yang Berjudul “Efektivitas DPRD Dalam Membuat Kebijakan Daerah”.

Kesimpulanya sisitem dan prosedur yang di terapkan DPRD Kabupaten tulungagung dalam menetapkan praturan daerah sudah berjalan dengan baik. Sistem dan prosedur yang secara konkrit di hujudkan dalam bentuk keputusan DPRD No 6 Tahun 1999 tentang Tata Tertib DPRD.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian didefenisikan sebagai ajaran mengenai cara-cara yang digunakan dalam memproses penelitian. Metode berguna untuk memberikan ketepatan, kebenaran dan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi.<sup>9</sup> Untuk itu, penelitian ini akan memaparkan beberapa cara sebagai batasan untuk mencapai kebenaran ilmiah, yakni : Jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **1.Jenis dan sifat penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mempelajari suatu gejala atau realita sosial dan mencoba untuk menemukan suatu pemahaman atau interpretasi makna terhadap masalah tersebut. Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif

---

<sup>9</sup> . Kartini kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Maju Mundur. Hal 17

lebih banyak memfokuskan pada proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat siklus yang dapat dilakukan berulang – ulang.<sup>10</sup>

Pengumpulan data dan analisis data diperlukan dalam membangun suatu konsep, hipotesis dan teori secara mendetail. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian.<sup>11</sup>

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka peneliti membutuhkan informasi kunci (key informan). Key informan yang dipilih yaitu anggota DPDR, sekretaris dewan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun. Peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

### a). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya<sup>12</sup> dan

Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data primer, peneliti menjadi responden yaitu: anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Ibu Sri Suyanti, SE selaku DPRD sebagai sumber utama dalam mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti.

<sup>10</sup> Kartini kartono. *Ibid.* Hal 35

<sup>11</sup> Nawari Hadari. 1987. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. Hal 157

<sup>12</sup> Hadar nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, (yogyakarta: gama press, 1987), h.63

## **b). Data Sekunder**

data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. data sekunder disebut juga dengan data tersedia.<sup>13</sup> data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, masyarakat pesisir barat, serta ditunjang dengan beberapa hasil penelitian ilmiah seperti skripsi, jurnal, serta menggunakan peraturan-peraturan daerah dan perundang-undangan.

Kedua data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terkumpul dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## **I. Metode Pengumpulan Data**

pengumpulan data yang diperlukan berkaitan dengan objek yang diteliti maka teknik yang digunakan adalah:

### **A. Observasi**

Menurut kartini kartono Observasi adalah pengamatan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas. observasi sebenarnya pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak

---

<sup>13</sup> *Ibid*

langsung.<sup>14</sup> metode ini dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian, selain itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden mulai interview. mengingat data yang didapatkan melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektivitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. dengan demikian data yang di peroleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Didalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif, dalam membangun kabupaten pesisir barat melalui kegiatan study banding kabupaten pesisir barat.

## **B. Wawancara**

Metode wawancara atau interview ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab ataupun percakapan secara langsung dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data. Menurut M, nasir. wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan<sup>15</sup>. wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang valid tentang dampak study banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Op. Cit, h. 136

<sup>15</sup> Mohanasir, *metode penelitian bidang sosial*, (yogyakarta: gajah madja universty press)



Metode interview yang digunakan dalam skripsi ini adalah interview bebas terpimpin, yakni pewawancara membawa kerangka-kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan kepada responden yang dalam hal ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Metode interview ini peneliti jadikan metode pokok dalam pencarian data karena beberapa alasan yaitu :

- 1). dipilih interview bebas terpimpin ini agar jalannya proses tanya jawab tidak kaku dan tidak keluar dari jalur yang direncanakan
- 2). orang-orang yang diinterview adalah mereka yang mengetahui dan dapat memberikan penjelasan tentang dampak study banding anggota DPRD terhadap kualitas peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat

### C. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, sepanduk, majalah, prasasti, notulen rapat, blanko-blanko dan sebagainya.<sup>16</sup> Metode ini sebagai pelengkap dalam rangka mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang telah dituliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-praturan sebagainya<sup>17</sup>, dan dokumen-dokumen tertulis dalam pelaksanaan kegiatan study banding oleh anggota DPRD. Data dokumen yang peneliti gunakan disini berupa dokumen laporan bulanan studi banding, dokumen-dokumen kerja anggota DPRD, berita acara maupun kegiatan-kegiatan study banding lainnya

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 148

<sup>17</sup> Ibid., h. 149

## **J. Metode pengolahan data**

Mengolah data yaitu “menimbang mengatur mengklasifikasikan” jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menggolongkan, menyusun, dan mengatur data yang relevan, tepat dengan masalah yang diteliti, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah :

### **a. Pemeriksaan (editing)**

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami.

### **a. Penandaan data (coding)**

Yaitu pemberian tanda pada data yang di peroleh baik berupa penomoran, penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukan golongan, kelompok klasifikasi dan menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekontruksi serta analisa data.

### **a. Penyusunan system data ( systematizing)**

.Yaitu mengurangi hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematika, data yang diedit dan di beri tanda, menurut klarifikasi dan urutan masalah

## 5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, dokumentasi, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan diajukan sebagai temuan orang lain<sup>18</sup>.

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh sesuatu kesimpulan penelitian, dalam menganalisis data yang menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>19</sup>

Peristiwa-peristiwa khusus dan kongrit yang dimaksudkan adalah peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan dampak study banding anggota DPRD terhadap kualitas peraturan daerah di kabupaten pesisir barat

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Kartini kartono, *pengantar metodologi riset sosial*, Op.cit, h.136

<sup>19</sup> Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: rake sarasin, 1990), h.79

<sup>20</sup> Suharsimi arikonto, *prosedur penelitian suatu prosedur praktek*, cet-ke3 (jakarta : bumi aksara, 1992), h.209

## BAB 1V

### DAMPAK STUDI BANDING ANGGOTA DPRD TERHADAP KUALITAS PERATURAN DAERAH

#### A.Dampak Studi Banding Terhadap

##### Kualitas Peraturan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan<sup>1</sup>.

Pengertian definisi Studi Banding yaitu meninjau dan belajar dari tempat lain agar dapat bisa diterapkan serta dikembangkan ditempat sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pengertian "studi" adalah penelitian ilmiah, kajian, telaah, sedangkan "Banding" berarti persamaan; tara; imbang, jika disatukan pengertian studi banding adalah proses penggalian ilmu khusus tentang kelebihan tempat lain sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembandingan ditempat kita. kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengunjungi atau menemui objek tertentu yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat, pelaksanaan kegiatan ini

---

<sup>1</sup>[www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml](http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml) (diakses 16 Maret 2017 pukul 20. WIB)

dimaksudkan untuk peningkatan mutu, peluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, dan lain-lain.

Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Pengertian dari studi banding itu sendiri adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislature atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut

---

2. <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/pengertian-studi-banding/>. Diakses pada jam



dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-

undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum<sup>3</sup>

Menurut penulis dengan adanya kegiatan studi banding yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD bisa membantu kemajuan di kabupaten pesisir barat mengapa demikian karna kabupaten pesisir barat baru terbentuk pada tahun 2015 jika di itung dari sekrang sudah 3 tahun berjalan, juga di sebut kabupaten termuda di provinsi lampung, tidak seperti kabupaten lainnya yang memang sudah matang setarateginya dalam pemebangunan atau penglolahan daerahnya, penulis rasa memang kabupaten pesisir barat harus melakukan studi banding atau kunjungan kerja kedaerah-daerah lainnya supaya anggota DPRD mempunyai ide-ide baru dari kabupaten lainnya sehingga dapat di terapkan di kabupaten sendiri dengan melihat atur-aturan tertentu.

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat ibu Sri suyanti dan sekaligus ktua PERDA mengatakan

a).sejauh ini menurut ibu sri suyannti sebagai anggota DPRD seberpa penting kegiatan studi banding ini di laksanakan di kabubapten pesisir barat

kita akan lebih meningkatkan lagi kenjungan kerja atau studi banding di kabupaten pesisir barat dengan baik tranparan dengan masarakat agar masyarakat kabupaten pesisir barat mengetahui kegiatan kegiatan anggota DPRD seprti hasil studi banding yang sudah kami lakukan dengan cara membuktikan hasil setelah melakun studi banding tersebut.ibu Sri suyanti menegaskan bahwa studi banding ini sangat penting dalam salah satu kegiatan DPRD, karna tujuannya melihat perkembangan kabupaten lainnya yang sudah maju untuk sebagai acuan di kabupaten pesisir bartat dan kabupaten muda ini harus matang

---

<sup>3</sup> Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hal. 8

setrateginya untuk kemajuan di bidang perekonomian, parawisata, dan pendidikan<sup>4</sup>.

Dengan melakukan kegiatan studi banding, kata bu sri selaku anggota DPRD bahawasanya kegiatan ini membantu pola pikir baru untuk DPRD sehingga bisa mendukung kemajuan di kabupaten pesisir barat, tentunya setelah melaksanakan studi banding harus tranfaran terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah dan hasilnya sebagai acuan untuk di terapkan di kabupaten pesisir barat, dengan melihat peraturan daerah yang sudah di tetapkan.

b). Menurut ibu bagaimana respon dari pemerintahan daerah dengan adanya kegiatan kunjungan kerja di kabupaten pesisir barat.?

Ya menurut saya sekaligus mewakili seluruh anggota dari komisi satu sampai komisi tiga bahwa sejauh ini pemerintahan daerah mendukung - mendukung saja kegiatan studi banding ini karena mungkin pemerintahan daerah paham betul dengan tujuan-tujuan studi banding tersebut dan kami juga pihak DPRD tranfaran dan berusaha membuktikan hasil dari studi banding seperti laporan-laporan hasil studi banding dan kami berusaha menerapkan di kabupaten pesisir barat seperti perda yang sudah kami buat tentang ketertipan pariwisata dan ini sampai sekarang terlaksana dengan baik.<sup>5</sup>

Sejauh ini anggota DPRD tidak terlepas dari komunikasi terhadap pemerintahan daerah kabupaten pesisir barat karena pemerintahan daerah sebagai penguasa dan saling mendukung dalam sebuah kegiatan DPRD, selagi kegiatan itu bernilai positif, terhadap kepentingan umum, dilihat hasil studi banding oleh anggota DPRD di buktikan hasilnya, contoh peraturan daerah yang sudah di buat tentang ketertipan pariwisata gunanya agar wisata kabupaten pesisir barat tetap terjaga.

---

<sup>4</sup> Sri suyanti anggota dprd kabupaten pesisir barat, wawan cara pribadi, 24 januari 2019

<sup>5</sup> Sri suyanti, *op, cit.*

c).Sejauhi ini apa hambatan anggota DPRD dalam melaksana kan studi banding ?.

-Lokasi antara kabupaten pesisir barat dengan tempat studi banding di tempuh dengan jarak yang jauh sehingga memerlukan waktu yang sangat lama dalam perjalanan menuju maupun pulang dari lokasi studi banding.

-Kegiatan dewan yang sangat padat,karna selain studi banding DPRD memiliki tugas dan fungsinya sendiri.studi banding hanya di lakukan 3 kali dalam 1 tahun dan melaksana kan studi banding tidak hanya berfokus pada pembuatan perda saja namun bisa saja tentang pendidikan,pembangunan,parwisata.<sup>6</sup>

Dalam peroses melaksana kan studi banding tentu nya memerlukan pikiran, fisik yang baik,agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak di inginkan, dari melihat hambatan anggota DPRD tersebut tentunya kegiatan studi banding memerlukan biaya yang besar nilainya untuk mencapai kelacaran kegiatan maka dari itu hasil dari studi banding memang harus mambawa dampak yang positif, bagi kemajuan kabupaten yang sangat muda ini baik di bidang pendidikan,pemmbangunan,dan perwisataan,sesui dengan fungsi anggota DPRD tersebut.

d).Langkah seperti apa anggota DPRD dalam penyusunan mekanisme perda saat melaksanakan studi banding.?

- menyusun program pembuatan praturan daerah
- penyusunan naska akademik
- penyampaian rancangan praturan daerah kepada badan pemebentukan praturan daerah (bapemperda)DPRD.
- pengkajian oleh bapemperda dengan bagian hukum pemerintahan daerah dan organisasi prangkat daerah yang terkait.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>.Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,*op,cit*.

<sup>7</sup>Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,*op,cit*.

Tentunya setiap melaksanakan kegiatan studi banding anggota DPRD harus melihat peraturan daerah yang sudah di resmikan, agar tidak melanggar dari peraturan yang sudah di tetapkan sebelumnya.

e).Sejauh ini adakah dampak positifnya setelah melaksanakan studi banding di lihat dari kualitas perdanya.?

- kita dapat mengetahui potensi yang di miliki oleh kabupaten pesisir barat dan dapat mengembangkannya
- memaksimalkan apa yang ada di kabupaten pesisir barat
- mengetahui perda-perda apa saja yang dapat di terapkan di lingkungan kabupaten pesisir barat
- mencontoh perda yang telah di terapkan di tempatlain menjadi perda kabupaten pesisir barat tentunya dengan menyesuaikan keadaan kabupaten pesisir barat<sup>8</sup>

studi banding adalah proses penggalan ilmu khusus tentang kelebihan tempat lain sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembandingan ditempat kita.kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengunjungi atau menemui objek tertentu yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat,pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu,peluasan usaha,perbaikan sistem,penentuan kebijakan baru,dan laian- lain.

Di lihat dari pengertiannya studi banding memang untuk pengalihan ilmu dan wawasan melihat dari mutu yang sudah di laksana kan di daerah yang memang maju, untuk di terapkan di daerah yang memang membutuhkannya dengan melihat kualitas-kualiat peraturan daerah yang sudah ada,kabupaten pesisir barat yang letak wilayahnya masi pelosokan tentunya masi banyak yang kurang

---

<sup>8</sup> Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,*op,cit.*



bisa memanfaatkan media sosial dengan baik untuk mendapatkan informasi atau data-data dari perkembangan wilayah lainnya.

f).apa dampak negatifnya setelah melaksanakan studi banding anggota DPRD di lihat dari kualitas perdanya.?

-tidak ada,karna studi banding kita belajar dengan pemerintahan daerah yang segala aspek lebih baik dari kabupaten pesisir barat<sup>9</sup>

Sejauh ini anggota DPRD belum mengatakan dampak negatifnya, karna memang studi banding ini membawa dampak yang positif, bagi kabupaten yang masih memerlukan informasi dan data-data dari pemerintahan yang jauh lebih maju meski studi banding memerlukan biaya yang banyak namun jika di kondisikan di wilayah yang masih pelosokan tidak jadi masalah, bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan studi banding tersebut.

g).strategi apa yang sudah di lakukan oleh anggota DPRD untuk implementasikan hasil studi banding di kabupaten pesisir barat.?

-searing dengan organisasi perangkat daerah tentang hasil dari studi banding tersebut  
 -membuat perda yang terinspirasi dari pemda tempat studi banding dengan memperhatikan segala aspek yang ada di kabupaten pesisir barat  
 -menerapkan hal-hal positif dan berbagi kepada masyarakat tentang hal-hal positif di tempat studi banding<sup>10</sup>

Hasil dari kegiatan studi banding memang harus di implementasikan di pemerintahan baru ini,karna melihat dari hambatan studi banding harus memerlukan waktu yang sangat lama. begitu juga dengan biaya yang diperlukan untuk kegiatan studi banding tersebut,anggota DPRD harus benar-bener

---

<sup>9</sup>Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,*op,cit.*

<sup>10</sup> Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,*op,cit.*

komitmen dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. sebelum menerapkan hasil studi banding jauh lebih baik ketika sering dengan organisasi prangkat daerah, dan memperhatikan segala aspek yang ada di kabupaten pesisir barat.

h). seperti apa hasil studi banding yang sudah di implementasikan di kabupaten pesisir barat.?

-ada beberapa hasil dari studi banding, di antaranya perda-perda yang telah di hasilkan, dan perda-perda tersebut telah di sahkan dan di terapkan pada kabupaten pesisir barat seperti di bidang pemerintahan, pembangunan, Pendidikan, dan pariwisata.<sup>11</sup>

Hasil dari studi banding seperti yang di jelas kan oleh anggota DPRD

telah membuat perda-perda yang sudah diresmikan sekaligus sudah di terapkan di kabupaten pesisir barat, seperti di bidang pendidikan, pembangunan, dan pariwisata.

## **B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Studi Banding Anggota DPRD**

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendorong merupakan faktor yang sangat penting karena faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan, pada faktor pendorong terdapat system yang dapat menjadi kunci keberhasilan dan sesuai, dengan teori implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai

---

<sup>11</sup>Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, *op, cit.*

a).Kabupaten Baru

karana kabupaten pesisir barat baru terbentuk di tahun 2013 dan pemekaran pada tahun 2015 pemerintahannya juga perdana,tentu masi perlu banyak sistem pebahuran untuk kemajuan kabupaten tersebut, seperti kegiatan studi banding yang di lakukan oleh pihak dprd maupun pihak pemerintahannya guna untuk mempelajari perda-perda atau system-system yang ada di kabupaten yang memeng jauh lebih baik.

Sri suyanti sebagai anggota DPRD mengatakan:

- a).kita dapat mengetahui potensi yang di miliki oleh kabupaten pesisir barat dan dapat mengembangkannya
- b).memaksimalkan apa yang ada di kabupaten pesisir barat
- c).mengetahui perda-perda apa saja yang dapat di terapkan di lingkungan kabupaten pesisir barat
- d).mencontoh perda yang telah di terapkan di tempatlain menjadi perda kabupaten pesisir barat tentunya dengan menyesuaikan keadaan kabupaten pesisir barat<sup>12</sup>

Dilihat dari hasil wawan cara terhadap anggota DPRD,memeng kabupaten yang sangat muda ini harus fokus pada pembangun-pembangunan karna baru tiga tahun pemekaran dari kabupaten lampung barat,tentunya tidak mudah untuk mengimpelemtasikan sysetem-syestem baru,di lihat dari judul peneliti membahas tentang dampak studi banding DPRD terhadap kualitas perdanya,tentunya suatu kegiatan ini mendukung untuk suatu ide-ide baru untuk di keimpelemtasikan di kabupaten pesisir barat.

---

<sup>12</sup> Sri Suyanti anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,*op,cit.*

## 2.Fakator Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan suatu system, organisasi ataupun peraturan seolah di tarik mundur dan sulit untuk berkembang seakan perubahan kearah yang lebih maju adalah yang sangat sulit di lakukan dan faktor penghambat menjadi inisiator kegagalan utama dalam penerapan suatu peraturan. Di dalam penelitian ini ada beberapa faktor pengahambat sebagai berikut :

### a).Lokasi Kunjungan Kerja

Lokasi antara kabupaten pesisir barat dengan tempat studi banding di tempuh dengan jarak yang jauh sehingga memerlukan waktu yang sangat lama dalam perjalanan menuju maupun pulang dari lokasi studi banding.

Kegiatan dewan yang sangat padat,karna selain studi banding DPRD memiliki tugas dan fungsinya sendiri.studi banding hanya di lakukan 3 kali dalam 1 tahun dan melaksana kan studi banding tidak hanya berfokus pada pembuatan perda saja namun bisa saja tentang pendidikan,pembangunan,parwisata.

dalam QS. Al Insyirah

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

Artinya :

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,(5)  
sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

Bedasarkan ayat tersebut, bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh putus asa karena di balik kesulitan ada kemudahan.Ulet adalah sifat yang harus di

miliki. Orang ulet selalu mencari jalan keluar dalam memecah masalah. Tentu di sertai sabar dan tidak mudah putus asa

Modori sebagai masyarakat mengatakan:

Studi banding itu apa si, setau saya kegiatan studi banding itu hanya membandingkan program-program kerja ke daerah yang memang cukup maju dan di kembangkan kembali di daerah yang memang membutuhkan program itu, apa lagi kegiatan studi banding ini membutuhkan uang dari pemerintahan tidak sedikit yang di perlukan untuk studi banding bisa-bisa membutuhkan uang sebanyak 1 miliaran sekali studi banding, kalo 1 miliar itu di gunakan untuk membangun pendidikan atau kesehatan itu saya rasa cukup, dari pada menghabiskan uang untuk kegiatan studi banding tersebut.<sup>13</sup>

Dari hasil wawan cara terhadap masyarakat sekitarnya, seperti kurang mendukung dengan kegiatan-kegiatan studi banding tersebut, seperti yang di jelaskan oleh bapak muhdori bahwasanya studi banding tersebut kurang diimplementasikan di kabupaten pesisir barat seperti studi banding tentang pariwisata yang sudah di lakukan oleh pihak anggota DPRD, belum ada kemajuan, jadi wajar-wajar saja masyarakat memberi kritikan terhadap anggota DPRD dan pemerintahan.

## **1. Dampak Studi Banding Terhadap Pasal-Pasal Peraturan Daerah**

### **A. Dampak Positif**

Secara harfiah, studi banding adalah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan yang berbeda dengan maksud meningkatkan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan dan lain-lain. Dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu, pada intinya studi banding adalah membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain

---

<sup>13</sup> Muhdori masyarakat krui pesisir barat.



dengan tempat sendiri, mengumpulkan data dan beragam informasi untuk dijadikan acuan merumuskan konsep yang kita inginkan.

Pernah mendengar ujaran ‘tak kenal maka tak sayang’?. Nah, umumnya kehidupan daerah-daerah di Indonesia memiliki berbagai keterbatasan terutama akses informasi. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan di luar daerahnya karena rutinitas mereka sehari-hari atau karena sulitnya mengakses informasi seperti itu dari luar daerahnya. Akibatnya, daerah itu kesulitan menciptakan lompatan kemajuan karena tidak memiliki referensi atau acuan yang mendorong mereka.

Padahal, untuk mencapai sebuah kemajuan butuh pandangan-pandangan baru, informasi baru dan kalau bisa sebuah contoh yang bisa mereka lihat langsung dengan mata kepala. Bukan rahasia lagi, sebagian besar masyarakat baru akan percaya pada sesuatu yang baru jika mereka melihatnya langsung dengan mata kepala. Makanya studi banding dengan datang ke daerah-daerah lain yang lebih maju.

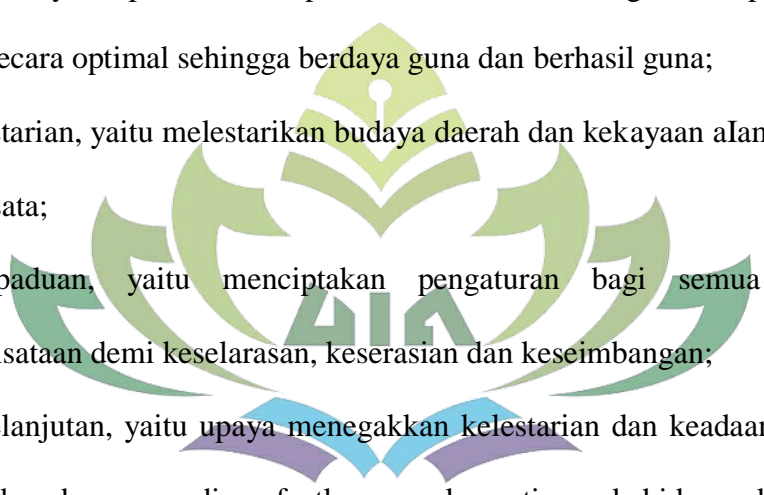
Banyak daerah yang melakukan studi banding ke daerah lain yang lebih maju bisa dengan cepat menciptakan langkah kemajuan bagi daerah. Dengan mendapatkan semangat dan inspirasi bahwa mereka juga bisa melakukan lompatan yang sama seperti yang mereka lihat di daerah-daerah tempat studi banding.

Dari penjelasan studi banding tersebut tentunya ada pasal-pasal perda yang di buat oleh DPRD yaitu :

1.Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIBDA) Kabupaten Pesisir Barat.yang salah satu bagian isi nya yaitu :

Pasal 2 yang isinya

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan: .

- 
- a).Manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
  - b). Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
  - c).Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
  - d).Berkelanjutan, yaitu upaya menegakkan kelestarian dan keadaan alam,budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup mernadai:
  - e).Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah,

### Pasal 3

Tujuan dari RIPPDA adalah:

- a).Secara umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas Objek dan Daya Tarik Wisata (OD'TW) serta pelayanannya;
- b).Secara khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan
- c).kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa bangga terhadap daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

### **2.Hasil Pencapaian studi banding anggota DPRD kabupaten pesisir barat.**

Baik-buruk dan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan dapat di lihat serta dianalisis berdasarkan hasil atau pencapaian dari proses implementasi studi banding di kabupaten pesisir barat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat masa ke anggotaan 2014-2019,dengan mengetahui hasil kerja atau pencapaian yang di lakukan oleh anggota DPRD kita akan mampu menganalisis dan menilai secara objektif baik-buruk dan sesuai atau tidaknya hasil dari studi banding anggota DPRD kabupaten pesisir barat.

Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Asnawi Zean mengatakan, Kabupaten Pesisir Barat baru diresmikan pada 22 April 2013. Wilayahnya memiliki dua pulau yakni Pulau Pisang dan Betuah dengan luas pantai mencapai 210 kilometer, dihuni sekitar 180 ribu jiwa maka dari itu kami dari anggota DPRD melaksanakan kunjungan kerja di kepulauan seribu dengan melihat perkembangan pariwisata kepulauan seribu kami bisa mencotoh dan bisa mengembangkan di wisata kabupaten pesisir barat dengan melihat kualitas perda-perda yang sudah ada dan membuat perda baru untuk melindungi pariwisata yang sudah dibangun<sup>14</sup>.

Seperti yang di jelas kan oleh bapak asnawi zaen sebagai anggota DPRD, bahwa kabupaten pesisir barat mempunyai tempat pariwisata yang bagus seperti kata bapak asnawi zean pesisir barat mempunyai 2 pulau, yaitu pulau pisang dan pulau betuah, kedua pulau ini butuh penataan yang baik karena banyak sekali para pengunjung untuk menikmati keindahan pulau tersebut, maka demikian mengadakan kegiatan studi banding ke daerah kepulauan seribu agar bisa mencotoh pariwisata di kepulauan seribu, yang memang daerah itu jauh lebih baik di bandingkan di pesisir barat, untuk kabupaten pesisir barat yang baru di resmikan tahun 2013 dan baru di mulai penataan pada tahun 2015 oleh pemerintahannya wajar saja anggota DPRD melakukan studi banding, namun ada sebagian masyarakat kurang puas dari hasil studi banding tersebut karena memang sampai sekarang penataan pariwisata di pesisir barat kurang maksimal, baik di bidang pembangunan, dan lain-lainnya dll.

Sektor Pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat, setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke krui, untuk berlibur, berselancar dan menikmati keindahan pantainya. Selain pantai krui memiliki dua pulau eksotis yaitu pulau pisang dan pulau Betuah, yang alami dan keindahannya

---

<sup>14</sup>. Asnawi Zean, Anggota Dprd Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara, 24 Januari 2019

tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata di dunia, Hanya memang potensi itu belum tereksplorasi

Akses perhubungan dari dan menuju Krui, bisa dilakukan melalui darat, laut, dan Udara. Di Krui terdapat Bandara Serai, Pelabuhan Kuala Stabas, dan Jalan nasional lintas Barat yang melewati seluruh wilayah krui yang berada digaris pantai sepanjang 200 Kilometer lebih. Potensi hasil bumi dan hutan, juga bagus dan memiliki nilai jual tinggi, seperti damar mata kucing yang merupakan getah damar kualitas terbaik didunia dan telah diakui internasional yang berasal dari krui. Belum lagi hasil bumi lainnya seperti cengkeh, kopi, lada, kakao. krui juga merupakan wilayah pertanian khususnya di Kecamatan Pesisir Selatan yang memiliki ribuan hektar sawah dengan sistem pengairan irigas

Saya sabagai peneliti mersa memang ada kekurangan terhadap penataan pemeritahan terhadap pariwisata di pesisir barat, meski anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah lainnya, namun hasil secara faktanya belum maksimal di impelemntasikan di pesisir barat, seperti pariwisata di tanjung setia yang sangat banyak pengemabarnya bahkan sampai keluar negri seperti inggris, australia, amrika, dan lain-lain dll. berapa hal untuk penglolahan wisita tersebut diantaranya:

- a). Kedua pulau potensial dijadikan tujuan wisata karena selama ini sudah banyak kunjungan wisatawan mancanegara. dengan ada nya wisata tentunya masyarakat sekitar tidak kesulitan mencari uang dengan cara berdagang.
- b). promosi pariwisata melalui internet sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi,

- c). membangun tempat peminapan agar pengunjung wisatawan luar negeri dan sekitarnya dapat menikmati ke indahan pantainya dan bisa menguna kan waktu yang tidak terlalu singkat.
- d).menyiapkan perahu untuk mencapai ke dua pulau tersebut yaitu pulau pisang dan pulau petuwah karan memang jauh dari daratan untuk menuju pulau tersebut.
- e).pembuatan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban wisata





## BAB II

### DAMPAK STUDI BANDING

#### TERADAP KULITAS PERATURAN DAERAH

#### A. Pengertian Dampak

##### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan<sup>1</sup>

##### 2. Pengertian Studi Banding

Pengertian definisi Studi Banding yaitu meninjau dan belajar dari tempat lain agar dapat bisa diterapkan serta dikembangkan ditempat sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pengertian "studi" adalah penelitian ilmiah, kajian, telaah, sedangkan "Banding" berarti persamaan; tara; imbang. Jika disatukan pengertian studi banding adalah proses penggalian ilmu khusus tentang kelebihan tempat lain sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembandingan ditempat kita. Kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengunjungi atau menemui objek tertentu yang sudah

---

<sup>1</sup>Ibid, [www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml](http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml) (diakses 16 Maret 2017 pukul 20.25 WIB)

disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat, pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, dan lain-lain.

Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Pengertian dari studi banding itu sendiri adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

### **B. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut

---

2. <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/pengertian-studi-banding/>. Diakses pada jam 23.11,0p, cit.

dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan 18 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1.Fungsi DPRD

John Stuart Mill mengemukakan 2 (dua) argumen pentingnya

lembaga perwakilan rakyat pada tingkat daerah (*Consideration on Representation Government*). yaitu  
*First, that local political institutions would be an essential element in a system of democratic government, because they widen the opportunity to participate and provide the capacity to educate the citizen in the practice of politics government. Second, that substantial scope for local administration made practical sense because local interest, knowledge and capacity to oversee made the prospect of likely: "in the details of management, therefore, the local bodies will generally have the advantage"*

(Pertama, institusi politik lokal merupakan unsur penting dalam suatu sistem pemerintah demokrasi, karena mereka memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan mengadakan pendidikan kepada warga negara dalam praktek politik pemerintahan. Kedua, lingkup substansi pemerintah lokal memberi pengertian praktek, karena kepentingan lokal, pengetahuan dan kemampuan untuk melihat prospek pemerintahan yang efektif dan efisien jauh lebih baik mungkin dalam rangka keberhasilan pelayanan: Dalam seluk beluk manajemen, oleh karena itu, merupakan keuntungan pemerintah lokal secara umum).

S.H Sarundajang sebagaimana yang telah dikutip oleh Marzuki Lubis mengatakan bahwa diperlukannya pemerintahan perwakilan daerah yang

mempunyai dua kegunaan.<sup>3</sup> Salah satunya adalah “*administratif*”, yaitu menyediakan fasilitas dan pelayanan. Yang lainnya adalah “*perwakilan*”, yang melibatkan warga negara dalam menentukan keperluan umum daerah tertentu dan cara memperolehnya. Pemerintahan perwakilan daerah (atau saat ini adalah seperti DPRD) merupakan hasil dari suatu proses yang merentangkan dan menghubungkan unsur-unsur “*perwakilan*” dan “*administrasi*” tersebut di tingkat daerah sehingga dapat sampai dengan baik dan merata kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Pemahaman ini memberikan cara pandang, bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar.<sup>4</sup> yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Konsekuensi hukum sebagai mitra sejajar, maka dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan

---

<sup>3</sup> Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 12.

<sup>6</sup> Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (UNAIR Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th.II Nomor 8, Juli-Desember 2012), Hlm 92.

fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Konstruksi hukum terhadap Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipetakan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut terdiri dari Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

2. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota;

3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan umum

Hukum merupakan produk politik mengantarkan fakta bahwa produk hukum tertentu merupakan produk politik tertentu pula.<sup>5</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa Anggota DPRD adalah aktor politik yang mewakili rakyat di lembaga legislatif daerah yang akan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya kedudukan DPRD setara dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang sejajar bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar yang artinya tidak saling

---

<sup>5</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978), hlm 179.

membawahi. Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, mengemban fungsi-fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan publik (legislatif), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi, kabupaten/kota

<sup>7</sup>Fungsi legislasi berdasarkan *Dictionary of Law* karya John M. Echols adalah berawal dari kata “legislasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*legislation*” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuat undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.<sup>8</sup> Sebagai salah satu fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu, Wodrow Wilson,<sup>9</sup> mengatakan bahwa “*legislation is an aggregate, not a simple production*”. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin<sup>10</sup> mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any form of law making*”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*enacted law*”, “*statute*”, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian

---

<sup>9</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD>, diakses pada 26 Agustus 2017.

<sup>8</sup>John M. Echols, *Dictionary of Law*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm 353.

<sup>10</sup>Wodrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 79.

<sup>10</sup>Jeremy Bentham dan John Austin, dalam Saldi Isra, *Ibid.*, hlm 79.



itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini adalah peraturan daerah)

Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi/kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD;

2. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;

2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi legislasi oleh DPRD merupakan serangkaian tanggung jawab untuk ikut berperan dalam penyusunan peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedudukan yang sama antara DPRD dan kepala daerah seharusnya mampu membentuk Perda yang berkualitas, *up to date* dan sesuai dengan kondisi zaman. Namun hubungan legislatif dan pemerintah daerah ini belum bisa berjalan dengan baik karena kurang optimalnya sumber daya manusia yang ada. Anggota

DPRD yang memiliki otoritas dalam legislasi terkadang tidak memiliki kompetensi dalam bidang perancangan undang-undang, sehingga kinerja DPRD dipertanyakan. Di samping itu, pengukuran kinerja DPRD dari fungsi legislasi bisa diukur dari berapa banyak Peraturan daerah yang disahkan secara konteks membela kepentingan masyarakat, berkualitas, mendorong kemajuan dunia usaha yang ujungnya menggerakkan sektor ekonomi daerah dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Maka, pentingnya anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensi di bidang legal drafting.

## **2. Tugas dan Wewenang DPRD**

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 344

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

### **3.kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)**

- 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah.
- 2.Sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

### **C.Peraturan Daerah**

#### **1.Pengertian Perda**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-

undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum<sup>11</sup>.

## 2. Tujuan Peraturan Daerah

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah

memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya<sup>12</sup>.

Kemudian menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah<sup>13</sup>. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah;

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

---

<sup>11</sup> Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hal. 8

<sup>12</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal 131

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat



### 3.Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

### 4.Tujuan Pembentukan perda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain<sup>14</sup>

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;
- Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, hlm. 70

6) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala tapkan untuk melaksanakan Perda.

8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.

9) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);

10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perdayang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kotapaling lama 30 (tigapuluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perdad dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan ersama Gubernur/Bupati/Walikota
2. Rancangan Perda yang telah disetujui olDPRDditetapkan oleh Kepala 40 Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
3. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.

6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.

7. Perdad dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran

daerah. Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid, hal.7*

Sebagai Negara Kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antarlain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya.<sup>16</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata “proses” yaitu :

1. Urutan kejadian dalam perkembangan sesuatu;
2. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk;
3. Perkara dalam pengadilan.<sup>17</sup>

Kata “pembentukan” berasal dari kata dasar “bentuk”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, cara membentuk kabinet baru mendapat tantangan dari pihak oposisi.

Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang diambilnya dalam *principles of legality*.<sup>18</sup> yaitu:

<sup>16</sup> Pipin Syarifin,. *Op.Cit*, hal 133.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hlm. 791.

1. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
2. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara) sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi. asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari asas formal dan materiil sebagai berikut.

1. Asas-asas formal dengan rincian:
  - a. asas tujuan yang jelas;

---

<sup>18</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Haven&London: Yale University Press,1971), hlm 38-39. Lihat juga dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah*

*Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm 50



- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga yang tepat;
- d. asas materi muatan yang tepat;
- e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
- f. asas dapatnya dikenali.

2. Asas-asas materiil dengan perincian:

- a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
- d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

#### 4. Mekanisme Pengawasan Perda

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi dan klarifikasi. Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, selain itu juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya langsung pada masyarakat.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amatlah bervariasi tergantung dengan iklim daerah dan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, hal itu membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi dan merupakan sejarah bagi negara Indonesia, banyaknya Perda yang dibatalkan. Kemendagri juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2014 jumlah pembatalan Perda berjumlah 710 Peraturan Daerah.<sup>19</sup> Hal tersebut juga menunjukkan masih banyak Perda Yang belum berkualitas dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih

<sup>19</sup> . <http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2014/02/26/katalog-produk-hukum-dari-tahun-1945->

[sd-2014-update-februari-2014](#), Katalog Produk Hukum dari Tahun 1945 s.d 2014. Diakses pada hari minggu tanggal 6 juli 2016 pada pukul 23.00 WIB

tinggi. Pembatalan suatu Perda merupakan akibat dari pengujian terhadap Peraturan Daerah. Dalam pembatalan Perda tersebut dilakukan oleh lembaga eksekutif atau yudikatif. Lembaga eksekutif dalam hal ini Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah. Sedangkan lembaga yudikatif dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri inilah yang dikenal dengan istilah *executive review*.

Pengertian *executive review* adalah segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan dalam istilah “*control internal*” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan (*regeling*), maupun Keputusan (*beschikking*).

Dapat dilihat bahwa proses *executive review* pada Peraturan Daerah untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah karna dengan adanya rasa tanggung jawab yang lebih oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang berkualitas agar tidak dibatalkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Pusat. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mesti mendapatkan perhatian yang lebih dalam proses eksekutif review dikarenakan dampak Perda tersebut langsung terhadap masyarakat serta banyak dan bervariasinya Perda Kabupaten/Kota cenderung meningkatkan kesalahan dalam muatan Perda tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Program legislasi daerah (Prolegda) merupakan pedoman pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang yakni pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk membentuk peraturan daerah. Untuk itu prolegda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini berarti bahwa idealnya sebelum peraturan daerah hendak dirancang sudah terlebih dahulu harus ada rencana pembentukan peraturan daerah tersebut dalam prolegda, sehingga angka pembatalan dapat lebih diminimalisir. Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, prolegda memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa prolegda mempunyai kedudukan hukum yang penting dalam penyusunan peraturan daerah ditingkatan provinsi dan kabupaten/kota, hanya saja arti penting kedudukan hukum prolegda ini belum dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Perencanaan

---

<sup>20</sup> . Ade Suraeni, 2010, Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah (makalah), disampaikan pada diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang adanya naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa :

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pentingnya Naskah Akademik sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum. Pembentukan peraturan daerah yang baik diakomodir dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 Permendagri

No. 53 Tahun 20011, secara lengkap sebagai berikut: Pasal 15 Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

dilakukan berdasarkan Prolegda. Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 17(1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. Pasal 19 (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- c. sasaran yang akan diwujudkan;
- d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- e. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Judul
- 2. Kata pengantar
- 3. Daftar isis terdiri dari:
  - a. BAB I: Pendahuluan
  - b. BAB II: Kajian teoritis dan praktik empiris
  - c. BAB III: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait



d. BAB IV: Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

e. BAB V:Jangkauan,arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda

f. BAB VI: Penutup

Berdasarkan ketentuan di atas, naskah akademik merupakan bagian Yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Selama ini naskah akademik sering kurang diperhatikan, sehingga sekalipun sudah di arahkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang dan Perda harus disertai naskah akademik. Dalam praktiknya,naskah akademik sering dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Secara normatif, tidak ada keharusan bahwa persiapan rancangan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan Naskah Akademik. Misalnya, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres No 68/2005) hanya menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Kemudian, penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Naskah Akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis tentang pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

### **5. Proses Mekanisme Perda**

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a). Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b). Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c). Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- d). Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- e). Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai

politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.

f). Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda

## **6. Pengajuan Peraturan Daerah Dari DPRD**

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- a). Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- b). Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- c). Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
- d). Pembahasan rancangan peraturan daerah
- e). Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

- a). Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

- b). Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pemandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pemandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pemandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pemandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

c).Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

d). Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- a). laporan hasil pembicaraan tahap III,
- b). pendapat akhir fraksi-fraksi,
- c). pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.
- d).Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **DAN STUDI BANDING**

#### **A. Gambaran Kabupaten Pesisir Barat**

##### **1. Letak dan Keadaan Alam**

Pesisir Barat adalah salah satu kabupaten yang secara administratif termasuk dalam provinsi Lampung dengan batas geografis sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Barat (Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Suoh, Kecamatan Bandar Negeri Suoh) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Provinsi Sumatera Selatan); sebelah timur dengan Kecamatan Pematang Sawah dan Kecamatan Semaka; sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu). Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 (lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) yang diundangkan tanggal 17 November 2012 ini memiliki luas wilayah sekitar 2.907,23 km<sup>2</sup> atau 495.04 ha dengan titik koordinat 4° 40' 0" – 6° 0' 0" Lintang Selatan dan 103° 30' 0" – 104° 50' 0" Bujur Timur (id.wikipedia.org).

Kabupaten Pesisir Barat terdiri atas 11 Kecamatan yang mencakup 2 kelurahan serta 116 pekon (desa). Ke-11 kecamatan itu beserta luasnya adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan Bengkunt Belimbing beribukota di Kota Jawa terdiri atas 14 pekon seluas 943,70 km<sup>2</sup> (32,69%); (2) Kecamatan Bengkunt beribukota di Pardasuka terdiri atas 9 pekon seluas 215,03 km<sup>2</sup> (7,45%); (3) Kecamatan Ngambur beribukota di Negeri Ratu Ngambur terdiri atas 9 pekon seluas 327,17 km<sup>2</sup> (11,33%); (4) Kecamatan Pesisir Selatan beribukota di Biha terdiri atas 15 pekon seluas 409,17 km<sup>2</sup> (14,17%); (5) Kecamatan Krui Selatan beribukota di Way Napal terdiri atas 10 pekon seluas 36,25 km<sup>2</sup> (1,26%) (6) Kecamatan Pesisir

Tengah beribukota di Pasar Krui terdiri atas 2 kelurahan dan 6 pekon seluas 120,64 km<sup>2</sup> (4,18%); (7) Kecamatan Way Krui beribukota di Gunung Kemala terdiri atas 10 pekon seluas 40,92 km<sup>2</sup> (1,42%); (8) Kecamatan Karya Penggawa beribukota di Kebuayan terdiri atas 12 pekon seluas 211,11 km<sup>2</sup> (7,31%) (9) Kecamatan Pesisir Utara beribukota di Kuripan terdiri atas 12 pekon seluas 84,27 km<sup>2</sup> (2,92%); (10) Kecamatan Lemong beribukota di Lemong terdiri atas 13 pekon seluas 454,97 km<sup>2</sup> (15,76%); dan (11) Kecamatan Pulau Pisang beribukota di Pulau Pisang terdiri atas 6 pekon seluas 64,00 km<sup>2</sup> (1,51%) (BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2013).

## **2.Topografi Dan Iklim**

Kabupaten Pesisir Barat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga tinggi (perbukitan dan pegunungan). Dataran rendah yang ketinggiannya 0,1-600 meter dari permukaan air laut hanya sekitar 27,2% dari seluruh wilayah Pesisir Barat. Demikian pula dengan dataran di atas 1.001 meter dari permukaan air laut hanya sekitar 25,9% yang seluruhnya merupakan wilayah pegunungan (Gunung Pugung, Sebayon, Telalawan, dan Tampak Tunggak). Sedangkan porsi yang paling besar (46,9%) adalah berupa dataran yang berketinggian antara 601-1.000 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan berkisar antara 3% -5%.

Sebagaimana daerah Sumatera yang berada di rantai pegunungan Bukit Barisan pada umumnya, Kabupaten Pesisir Barat beriklim tropis yang ditandai oleh adanya dua zona iklim, yakni zona A dan zona B. Zona A yang memiliki jumlah bulan basah lebih dari bulan berada di bagian barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), termasuk daerah Krui dan Bintuhan. Sedangkan, zona B yang memiliki jumlah bulan basah antara 7-9 bulan berada di bagian timur TNBBS. Curah hujannya rata-rata 2.500-3.000 (zona A) dan 3.000-4.000 (Zona B) milimeter per

tahun. Sementara itu, suhu udaranya berkisar dari 20° Celcius sampai dengan 28° Celcius.

Oleh karena sebagian wilayahnya berada dalam lingkup TNBBS yang merupakan salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Sumatera, maka memiliki formasi vegetasi yang cukup lengkap, yaitu vegetasi pantai, payau, rawa, hutan tanaman, hutan bambu dan hutan hujan tropika. Jenis-jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di dalam vegetasi ini diantaranya adalah pidada (*Sonneratia* sp.), nipah (*Nypa fruticans*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), pandan (*Pandanus* sp.), cempaka (*Michelia champaka*), meranti (*Shorea* sp.), mersawa (*Anisoptera curtisii*), ramin (*Gonystylus bancanus*), keruing (*Dipterocarpus* sp.), damar (*Agathis* sp.), rotan (*Calamus* sp.), bunga raflesia (*Rafflesia arnoldi*), bunga bangkai jangkung (*Amorphophallus decus-silvae*), bunga bangkai raksasa (*A. titanum*), anggrek raksasa/tebu (*Grammatophyllum speciosum*), dan lain sebagainya (sekitar 10.000 jenis tumbuhan yang 17 diantaranya termasuk marga endemik).

Vegetasi-vegetasi tersebut sampai saat ini kondisinya relatif masih lengkap dan asli, sehingga memungkinkan beraneka ragam jenis fauna hidup dan berkembang di dalamnya. Menurut situs resmi Balai TNBBS ([tnbbs.org](http://tnbbs.org)), di taman nasional ini memiliki beragam jenis satwa yang terdiri dari 201 spesies mamalia (22 spesies diantaranya dilindungi undang-undang), 582 spesies burung (21 dilindungi), 270 spesies ikan air tawar, dan 30 jenis amfibi dan repilia yang beberapa diantaranya dilindungi undang-undang. Jenis-jenis satwa itu diantaranya adalah: beruang madu (*Helarctos malayanus malayanus*), badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis*) berjumlah sekitar 300 ekor, harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) berjumlah kurang dari 400 ekor, gajah Sumatera (*Elephas maximus*



sumatranus) berjumlah kurang dari 2000 ekor, tapir (*Tapirus indicus*), ungko (*Hylobates agilis*), siamang (*H. syndactylus syndactylus*), simpai (*Presbytis melalophos fuscaturina*), kancil (*Tragulus javanicus kanchil*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), kelinci belang sumatera, sekitar 22 jenis kelelawar (*Balionyctes maculata*, *Cynopterus branchyotis*, *Cynopterus minutus*, *Hipposideros bicolor*, *Hipposideros cervinus*, *Hipposideros cineraceus*, *Hipposideros diadema*, *Hipposideros larvatus*, *Kerivoula hardwickii*, *kerivoula intermedia*, *Kerivoula papillosa*, *Kerivoula pellucida*, *Megaderma spasma*, *Murina cyclotis*, *Murina Suilla*, *Nycteris javanica*, *Phoniscus atrox*, *Rhinolopus affinis*, *Rhinolopus bornensis*, *Rhinolopus lepidus*, dan *Rhiolopus trifolius*), dan lain sebagainya.

### **3.Pemerintahan**

Perintahan Kabupaten Pesisir Barat memiliki sejarah yang relatif masih baru karena merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat sendiri terbentuk pada tahun 1991 karena adanya pemekaran Kabupaten Lampung Utara yang awalnya memiliki luas sekitar 58% dari luas Provinsi Lampung. Pemekaran Kabupaten Lampung Utara selanjutnya membentuk sebuah kabupaten baru lagi bernama Tulang Bawang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997. Dan, pemekaran terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 membentuk Kabupaten Way Kanan.

Pembentukan Pesisir Barat menjadi kabupaten yang otonom ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemekaran Daerah Otonom Pesisir Barat (Lembaran Negara Nomor 231 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364 tahun 2012) tanggal 17 November 2012 (Buku Putih Sanitasi (PBS) Tahun 2014). Adapun bentuk lambang daerahnya, berdasarkan peraturan upati Pesisir Barat Nomor 04 tahun 2013, adalah menyerupai perisai/tameng bersudut lima

yang menggambarkan bahwa pemerintah setempat menjamin keamanan dan ketertiban wilayahnya. Di dalam lambang tersebut terdapat aksara serta gambar-gambar atau lukisan-lukisan sebagai berikut: (a) aksara Lampung berbunyi "Helauni Kibakhong" berwarna hitam dengan dasar kuning emas memiliki arti "kebersamaan" yang bermakna terbentuk dan keberadaan Kabupaten Pesisir Barat atas dasar semangat dan gotong royong masyarakatnya; (b) bidang persegi panjang vertikal berwarna putih di tengah dasar melambangkan pemerintahan yang lurus, bersih, dan berwibawa dengan mengutamakan transparansi; (c) garis berkelok berwarna putih dan biru muda representasi dari air laut melambangkan Kabupaten Pesisir Barat kaya akan sumber daya kealutan. Selain itu air laut juga dapat pula diartikan sebagai gerakan dinamis masyarakat dalam membangun daerahnya; (d) perahu berwarna merah melambangkan ketangguhan masyarakat menghadapi segala bentuk rintangan serta hambatan dalam mengarui kehidupan; (e) pohon damar berwarna hijau muda yang membentuk stilasi siger melambangkan kekayaan potensi hasil hutan serta simbol masyarakat Pesisir Barat yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat daerah dan negara; (f) pegunungan berwarna hitam melambangkan kesuburan dalam bidang pertanian dan perkebunan di wilayah Pesisir Barat; dan (g) payung agung berwarna kuning emas sebagai simbol melindungi, mengayomi, dan menjunjung tinggi.



Selain itu, kabupaten ini juga memiliki visi yaitu menuju kota modern berbasis lingkungan. Sedangkan misinya adalah: meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan pertanian; meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah;

meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan; meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi; meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau; meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; dan meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan ([pesisirbaratkab.go.id](http://pesisirbaratkab.go.id)).

Sedangkan organisasi pemerintahan awalnya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sehingga Bupati mengeluarkan Peraturan Pejabat Bupati Nomor 01 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2051/SJ/ tanggal 31 Agustus 2007. Namun, untuk lebih merampingkan struktur organisasinya agar bekerja lebih efektif, Bupati mengeluarkan lagi Peraturan Nomor 01 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri atas: PLT Bupati, DPRD. Sekretarian DPRD, Sekretarian Daerah, Staf Ahli (Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat), Asisten Bidang Administrasi Umum (Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol), Kecamatan, Dinas Daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga; Kesehatan; Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Pekerjaan Umum; Perhubungan dan Kominformasi; Pertambangan dan Energi; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pasar; Pertanian), Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Pekon; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah; Rumah Sakit Umum Daerah; Kantor Ketahanan Pangan), dan Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Dari struktur di atas dapat diketahui bahwa tampuk pimpinan tertinggi kabupaten dipegang oleh seorang Bupati. Pengangkatannya dipilih oleh masyarakat untuk periode lima tahun. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Daerah yang menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas: Sekretaris Daerah; Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat); Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Bidang Administrasi Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah juga membawahi sejumlah Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon. Lembaga-lembaga tersebut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas; (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan (e) pengelolaan administratif.

#### **4.Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berjumlah 144.763 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 33.292. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-lakinya mencapai 76.240 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 68.523 jiwa. Para penduduk ini tersebar di 11 kecamatan, yaitu Pesisir Selatan dihuni oleh 21.762 jiwa (5,09%), Bengkunt dihuni oleh 7.620 jiwa (5,61%), Bengkunt Belimbing 24.009 jiwa (5,61%), Ngambur 17.953 jiwa 4,20%, Pesisir Tengah 18.358 jiwa (4,29%), Karya Penggawa 14.292 jiwa (3,34%), Way Krui 8.328 jiwa 1,95%, Krui Selatan 8.531 jiwa 1,99%, Pesisir Utara 8.202 jiwa 1,92%, Lemong 14.365 jiwa 3,36%, dan Pulau Pisang dihuni oleh 1.343 jiwa (0,31%). Jika dilihat berdasarkan golongan usia, maka penduduk yang berusia 0-14 tahun ada 54.825 jiwa (34,44%), kemudian yang berusia 15—54 tahun ada 76.632 jiwa (50,83%), dan yang berusia 55 tahun ke atas 12.559 jiwa (14,73%). Ini menunjukkan bahwa penduduk Pesisir Barat sebagian besar berusia produktif.

#### **5.Pola Pemukiman**

Dari segi luas, pemukiman menempati urutan keempat setelah setelah hutan, persawahan dan perkebunan. Pemukiman yang tentunya berada di luar hutan, perladangan dan persawahan ini semakin mendekati jalan semakin padat. Umumnya perumahan berada di sekitar jalan, baik itu jalan kabupaten, kecamatan, maupun desa, berjajar dengan arah menghadap ke jalan (pola pita/ribbon). Arah rumah yang berada bukan di pinggir jalan pun arahnya mengikuti yang ada di pinggir jalan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014, jumlah rumah yang ada di kecamatan tersebut ada 34.196 buah. Dari ke 34.196 buah rumah tersebut, 7.217 buah diantaranya berada di Kecamatan Pesisir tengah. Sisanya, (berdasarkan jumlah) berada di Kecamatan Pesisir Selatan 5.563 buah,

Bengkunat Belimbing 5.338 buah, Ngambur 4.344 buah, Lemong 3.229 buah, Pesisir Utara 2.556 buah, Bengkunat 2.466 buah, Karya Penggawa 1.445 buah, Way Krui 826 buah, Krui Selatan 783 buah, dan Kecamatan Pulau Pisang 429 buah.

Sebagian besar rumah yang berada di Pesisir Barat masih bersifat tradisional yang mengelompok dan tersebar secara sporadis. Adapun cirinya berupa bangunan semi permanen berbentuk panggung, tingkat KDB rendah, MCK di luar rumah, menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum, dan kurang atau belum mendapat pasokan listrik. Khusus untuk pasokan listrik, kabupaten baru ini relatif masih kurang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Bahkan, pemadaman hampir terjadi setiap hari dengan jangka waktu antara beberapa jam hingga beberapa hari. Oleh karena itu, untuk mensiasatinya hampir di setiap rumah memasang genset berbahan bakar solar agar dapat tetap menikmati listrik.

## **6. Perekonomian**

Letak Kabupaten Lampung Barat yang relatif jauh dari ibukota provinsi (Bandarlampung) membuat perekonomian mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut data dari BPS Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013, hanya sebagian kecil lahan saja yang digunakan sebagai areal perumahan. Selebihnya, merupakan lahan pertanian, dan perladangan/perkebunan, dengan rincian: padi sawah seluas 8.683 ha dengan produksi sejumlah 67.663 ton, padi irigasi non teknis seluas 3.894 ha dengan produksi sejumlah 9.755 ton, Jagung seluas 1.543 ha 15.005 ton, ubi kayu seluas 169 ha 5.455 ton, ubi jalar seluas 90 ha 770 ton, kedelai seluas 158 ha 61 ton, kacang hijau seluas 152 ha 82 ton, kacang tanah seluas 246 ha 204 ton, mentimun seluas 176 ha 24.113 ton, bawang daun seluas 2 ha 2.072 ton, bawang merah seluas 5 ha 350

ton, buncis seluas 247 ha 20.838 ton, kacang panjang seluas 261 ha 20.819 ton, kentang seluas 40 ha 4.966 ton, kubis seluas 406 ha 104.010 ton, sawi seluas 369 ha 4.747 ton, terung seluas 240 ha 10.460 ton, cabe seluas 323 ha 39.885 ton, tomat 315 ha 75.432 ton, wortel 244 ha 48.527 ton, bayam 138 ha 8.21 ton, kangkung 151 ha 9.283 ton, labu siam 61 ha 58.958 ton, nenas 566 ha 1.770 ton, sawo 366 ha 4.188 ton, rambutan 744 ha 2.539 ton, alpokat 965 ha 8.952 ton, duku 15.323 ha menghasilkan buah sejumlah 11.460 ton, nilai 4,7 ton, pinang 95,8 ton, fanili 0,8 ton, aren 87, ton, cengkeh 252 ton, kakao 1.002 ton, kayu manis 212, ton, kelapa 7.100 ton, karet 24, ton, kelapa sawit 58.680 ton, kemiri 50 ton, robusta 4.470 ton, dan lada menghasilkan panen sejumlah 1.873 ton.

Selain pertanian ada banyak lagi sektor yang menunjang perekonomian. Menurut data dari PDRB Kabupaten Pesisir Barat yang mengutip dari BPS Lampung Barat (Kabupaten Induk), aktivitas perekonomian yang mencapai 2,9 triliun dibagi menjadi beberapa kategori lapangan usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan 52,90%; pertambangan dan penggalian 5,15%; industri pengolahan 5,37%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06%; konstruksi 5,09%; perdagangan besar/eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor 11,23%; transportasi dan pergudangan 0,9%; penyedia akomodasi dan makan minum 1,55%; informasi dan komunikasi 1,56%; jasa keuangan dan asuransi 1,64%; real estate 3,55%; jasa perumahan 0.14%; dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial 5,17%.

## **7.Pendidikan dan Kesehatan**

Sebagai sebuah kabupaten, Pesisir Barat tentu saja memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang cukup memadai bagi masyarakatnya. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kabupaten ini, diantaranya adalah: 53 buah Taman



Kanak-kanak dengan jumlah siswa sebanyak 1.503 orang dan 163 tenaga pengajar; 109 buah Sekolah Dasar dengan jumlah siswa sebanyak 18.808 orang dan 1.157 tenaga pengajar; 31 buah Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa sebanyak 30.414 orang dan 5.649 orang tenaga pengajar; 14 buah Sekolah Menengah Atas dengan jumlah siswa sebanyak 5336 dan 219 tenaga pengajar; 26 buah Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah siswa sebanyak 2.780 orang dan 332 orang tenaga pengajar; 40 buah Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah siswa sebanyak 4.000 orang dan 332 orang tenaga pengajar; dan 8 buah Madrasah Aliyah dengan jumlah siswa sebanyak 936 orang dan 156 orang tenaga pengajar.

Sedangkan untuk sarana kesehatan terdapat 1 buah rumah sakit, 5 buah puskesmas, 17 buah posyandu, dan 18 buah Polindes. Berdasarkan data yang tercatat pada Balap Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat tahun 2013 tercatat 253 orang tenaga kesehatan, diantaranya adalah: 2 dokter umum, 196 orang bidan/perawat, dan 55 orang tenaga kesehatan lainnya (BPS Kabupaten Lampung Barat, 2013).

## **8. Agama dan Kepercayaan**

Agama yang dianut oleh Masyarakat Kabupaten Lampung Barat sangat beragam, yaitu: Islam (144.493 jiwa), Kristen, Katolik, Hindu (270 jiwa), Budha, dan aliran Kepercayaan. Ada korelasi positif antara jumlah pemeluk suatu agama dengan jumlah sarana peribadatan. Hal itu tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang berkaitan dengan agama Islam (mesjid, musholla dan langgar). Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, jumlah mesjid yang ada di sana mencapai 250 buah dan musholla/langgar/surau mencapai 222 buah. Sarana peribadatan yang berkenaan dengan penganut agama Kristen dan Katolik mencapai 13 buah. Sementara data yang berkaitan dengan sarana peribadatan penganut Hindu, Budha, dan atau gedung pertemuan maupun jumlah penganut aliran kepercayaan belum ada. (Ali Gufron)

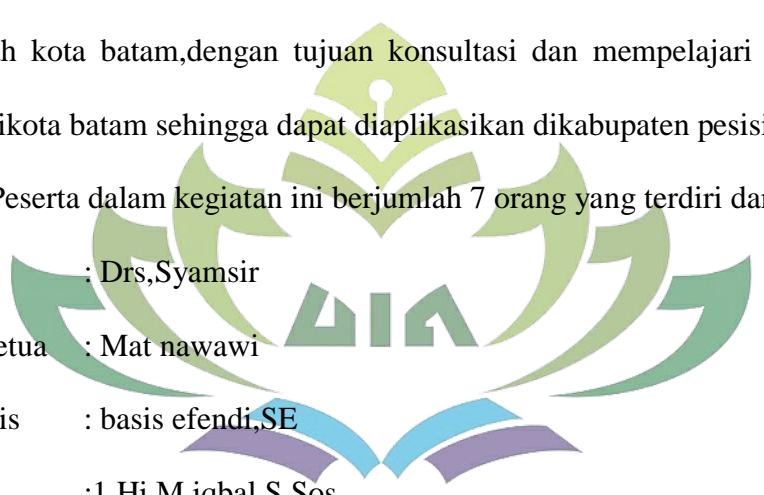
### A. Program Studi Banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat

Studi Banding merupakan satu langkah baik yang disusun dan direncanakan berupa program kegiatan yang tujuan sangat positif serta pencapaiannya harus sesuai dengan tujuan inti, sehingga akan teraplikasi secara baik guna kemajuan daerah dalam menambah wawasan dalam mengambil keputusan serta kebijakan politik di daerah, semata-mata guna mencapai target kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kabupaten pesisir barat melaksanakan kegiatan studi banding tiga kali dalam setahun pada tahun 2018, DPRD telah melakukan studi banding di daerah-daerah yang memang jauh lebih maju dibandingkan kabupaten pesisir barat

Pada tanggal 24 Mei 2018 DPRD Komisi C telah melaksanakan studi banding di daerah Kota Batam, dengan tujuan konsultasi dan mempelajari potensi kawasan wisata di Kota Batam sehingga dapat diaplikasikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari :



Ketua : Drs, Syamsir  
 Wakil ketua : Mat Nawawi  
 Sekretaris : Basis Efendi, SE  
 Anggota : 1. Hi, M. Iqbal, S. Sos  
 2. Agus Cik  
 3. Dedi Irwan  
 4. Aris Ikwanda

DPRD Komisi A juga melakukan studi banding pada tanggal 23 Mei 2018, di daerah Kota OKU Utara, dengan tujuan membandingkan, maupun mengadopsi program kegiatan DPRD termasuk juga terkait dengan hak dan kewajiban anggota DPRD.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

Ketua : Eliza Wati, S. Sos

Wakil ketua : Ali Yudiem,S.H

Sekretaris : Ahmad Husnaini,S,pd.i

Anggota : 1.Sri Suyanti,SE

: 2.Dr.Asnawi Zean,DT.MH

:3.Wahyu Nurbaiti

## **B.Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat**

Undang-undang Nomor 22/2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengemukakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam UU NO 32/2003 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki dan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sesuai dengan tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat Nomor 17 tahun 2014.

Visi DPRD kabupaten Pesisir Barat masa bukti 2014-2019 adalah :

“Mewujudkan masyarakat kabupaten pesisir barat yang bertaqwa ,berdaya, berbudaya menuju sejahtera,melalui penguatan peran DPRD kabupaten pesisir barat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang berpiak kepada rakyat”. Penjelasan lebih detail visi tersebut uraikan dalam misi DPRD kabupaten pesisir barat sebagai berikut :

- 1.Menghasilkan produk-produk kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2.Meningkatkan profesionalisme anggota DPRD sebagai refresentasi rakyat kabupaten pesisir barat mengevaluasi dan mendorong perbaikan regulasi perizinan

yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten pesisir barat untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan ekonomi sosial dan budaya yang mungkin timbul.

- 3.Mendorong terwujudnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat politik/ekonomi/sipil dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
- 4.Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,
- 5.Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD,

Adapun fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Pesisir Barat adalah:

#### 1.Fungsi

Dewan perwakilan daerah kabupaten pesisir barat mempunyai fungsi :

- a.Fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah.
- b.Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama pemerintah daerah.
- c.Fungsi pengawasan yaitu, fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah baik dalam bentuk pelaksanaan APBD maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

## 1. Tugas dan Wewenang

Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir barat mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama bupati
- b. Membahas dan memberikan persetujuan perancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh bupati.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten pesisir barat.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

- d. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memberikan persetujuan terhadap perencanaan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- g. Memberikan persetujuan rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- h. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah lembaga demokrasi perwakilan yang paling dekat dengan konstituennya semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi, maka jadi penting adanya optimalisasi fungsi dan peranan DPRD, karena DPRD memiliki posisi dan peranan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah pada era perubahan

Oleh karena itu, DPRD memiliki peran sebagai lembaga yang turut mengendalikan dan mitra dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh eksekutif menurut undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , undang-undang 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ,serta peraturan DPRD nomor 17 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat bahwa alat kelengkapan DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan musyawarah
- b. Komisi
- c. Badan legislasi daerah
- d. Badan anggaran
- e. Badan kehormatan

Alat kelengkapan lain di perlukan dan di bentuk oleh rapat paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari fraksi-fraksi yang merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dan bukan merupakan alat kelengkapan DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD di bantu oleh sekretariat DPRD yang di pimpin oleh sekretaris DPRD.

Sesuai Dengan Ketentuan pasal 38 ayat (1) peraturan DPRD Nomor 17 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi DPRD kabupaten pesisir barat meliputi komisi A, komisi B, komisi C, dengan masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada pasal 39 peraturan DPRD nomor 7 tahun 2015 tentang tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat.

Berikut merupakan nama-nama perkomisi anggota DPRD sebagai berikut:

#### DPRD komisi A

Ketua : Eliza Wati, S.Sos.

Wakil Ketua : Ali Yudiem, SH.

Sekretaris : Ahmad Husaini, S.Pdi

Anggota : 1. Sri Suyanti, SE.

: 2. Dr. Asnawawi Zein, DT.MH.

: 3. Wahyu Nurbaiti





## DPRD Komisi B

Ketua : Rifzon Efendi

Wakil Ketua : April Lizwar

Sekretaris : Martin Sofian,S.Kom

Anggota :1.Kanadi

:2.Dedi Ansori

:3.Supardi Rudianto

:4.Saiful Hadi

## DPRD Komisi C

Ketua : Drs.Syamsir

Wakil Ketua : Mat Nawawi

Sekretaris : Basis Efendi,SE.

Anggota :1.Hi,M.Iqbal,S.Sos.

:2.Agus Cik

:3.Dedi Irawan

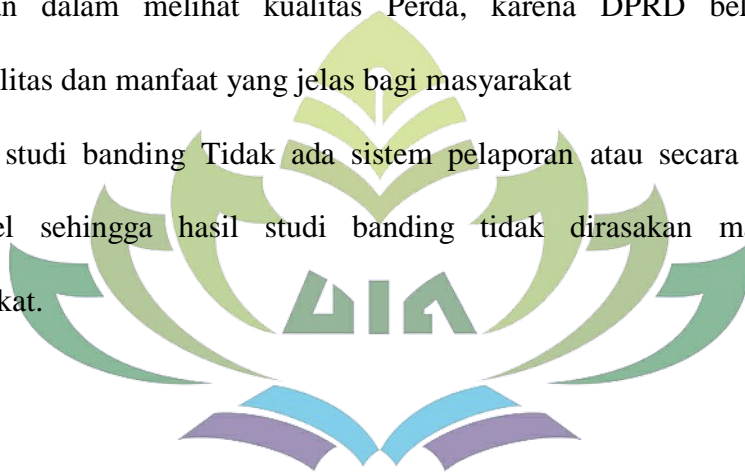


## **BAB V PENUTUP**

### **A.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di lakukan dalam peneliti ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan studi banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat merupakan kegiatan tiga (3) kali dalam setahun.karena tujuan studi banding untuk mengumpul kan informasi dan mencari wawasan ke daerah lain untuk di terapkan di daerah sediri
2. Hasil pelaksanaan studi banding DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum signifikan dalam melihat kualitas Perda, karena DPRD belum memenuhi akuntabilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat
3. hasil studi banding Tidak ada sistem pelaporan atau secara transparan dan akuntabel sehingga hasil studi banding tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.



## B. SARAN

Telah mengambil beberapa kesimpulan pada skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sehingga dapat di hujutkan dalam kehidupan nyata. sehingga apa yang terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Anggota DPRD dalam penyusunan kualitas rancangan Perda hendaknya mengoptimalkan fungsi staf ahli DPRD sebagai akses masuk informasi atau pengetahuan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi
2. DPRD disarankan untuk menempuh cara lain dalam pengumpulan informasi rancangan Perda, yaitu dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar yang telah membuat Perda sebelumnya atau orang yang berkompeten terkait dengan materi Perda yang akan dibahas.
3. Anggota DPRD tentunya harus benar-benar mengimplementasikan hasil dari studi banding tersebut.
4. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat lebih mendengarkan lagi masukan dan keluhan masyarakat pesisir barat karna DPRD tidak lain dari perwakilan rakyat.

## DAPSTAR PUSTAKA

### *Referensi Buku*

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*  
Jakarta : Rinekakipta.
- Ade Suraeni, 2010, Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah (makalah)  
disampaikan pada diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11,  
Yogyakarta, 2001, hlm.70
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-  
undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hal. 8
- Chairijah, 2008. *Peran Prolegnes dalam Pembentukan dan Pembangunan Hukum  
Nasional*, Makalah dalam penelitian Penyusunan dan prancang peraturan  
Perundang-Undangan Depkumham RI.
- Depkum HAM, *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, 2006.
- H.Zainal Abidin. *Imamah dan Implikasinya dalam kehidupan sosial*, cet 1, (palu  
badan Litbang dan Diklat kementerian agama RI, 2012) h.16
- Hadar nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, (yogyakarta: gama press, 1987),  
h.63
- John M. Echols, *Dictionary of Law*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm 353.  
10.Woddrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran  
Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 79.
- Jeremy Bentham dan John Austin, dalam Saldi Isra, *Ibid.*, hlm 79.
- Kartinikartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Maju  
Mundur. h 17
- Mohnasir, *metode penelitian bidang sosial*, (yogyakarta: gajah madja  
universitipress)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta,  
2007. hlm.15

Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 12.

Muhamad A. Musa'ad, *Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Integrasi*. ITB. Bandung. 2005.

Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: rake sarasin, 1990), h.79

Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (UNAIR Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th.II Nomor 8, Juli Desember 2012), Hlm 92.

Nawari Hadari. 1987. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. Hal 157

Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transtation: Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978), hlm 179.

Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*

Suharsimi arikonto, prosedur penelitian suatu prosedur praktek, cet-ke3 (jakarta bumi aksara, 1992), h.209

Taufik, Effendi. 2006. *Upaya Pemerintahan Meningkatkan Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal, jurnal Demokrasi dan HAM*

Woddrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 79

### ***Undang-Undang***

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.](#)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,,DPD,DPRD (MD3).

Undang Undang pasal 44 Ayat 1 Nomer 32 tahun 2004

Undang-Undang Nomer 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

### ***Web Site***

<http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2014/02/26/katalog-produk-hukum-daritahun-1945-sd-2014-update-februari-2014>, Katalog Produk Hukum dari Tahun 1945 s.d 2014. Diakses pada hari minggu tanggal 6 juli 2016 pada pukul 23.00 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD>,diaksespada 26 Agustus 2017.

<http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2014/02/26/katalog-produk-hukum-dari-tahun-1945->

<http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan-peraturandaerah.html>.mekanismePembatalanperaturanderah.diaksespada harirabu tanggal10juli2016 pada pukul09.30 WIB

### ***Wawancara***

Sri Suyanti Ketua Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Wawancara Prdibadi,24 Januari 2019

Sri Suyanti Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Wawancara Pribadi,24 Januari 2019

Asnawi Zein Anggota DPDR Kabuparen Pesisir Barat Wawancara Pribadi,24 Januari 2019

Muhdori Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Wawancara Pribadi,25 Januari 2019